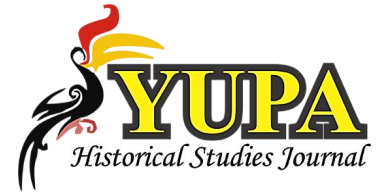


P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754

Yupa: Historical Studies Journal

Vol. 5 No. 2, 2021 (61-77)

<http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>



Kontroversi Sejarah La Mohang Daeng Mangkona dan Hari Jadi Kota Samarinda: Sebuah Tinjauan Kritis

Muhammad Sarip¹, Nabila Nandini²

¹Lasaloka-KSB, Samarinda, Indonesia

²Lasaloka-KSB, Samarinda, Indonesia

¹msarip19@gmail.com, ²nabiland22@gmail.com

Received	Accepted	Published
02/02/2022	06/04/2022	10/04/2022

Abstract *The establishment of Samarinda on January 21st, 1668 which was set out by the Regional Government of the Municipality of Samarinda in Regional Regulation Number 1 of 1988, has been a controversy. The historical milestone of the establishment was based on the arrival event of a group from Sulawesi Island to Samarinda. Selection of this event disregards the traditional historiography record of an ancient Kutai local community which where exist long before the Bugis settlement in Samarinda Seberang. This study aims to analyse the historical validity of the arrival of La Mohang Daeng Mangkona's entourage in Samarinda Seberang which is claimed to be the basis for Samarinda City's establishment. Conducted with historical research methods, the result of this study found that the story of La Mohang Daeng Mangkona as the leader of the Bugis Wajo migrants to Samarinda is not based on valid historical sources. Following the result of this research, the researcher recommends to the Government of Samarinda City to revise and reconstruct the history of Samarinda City's establishment based on the historiography method.*

Key words: Samarinda, City Anniversary, Daeng Mangkona, Bugis Wajo, Kutai

Abstrak Hari Jadi Kota Samarinda tanggal 21 Januari 1668 yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kotamadya Samarinda dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 menuai kontroversi. Penetapan tonggak berdirinya Kota Samarinda berdasarkan awal kedatangan rombongan dari Pulau Sulawesi ke Samarinda mengabaikan catatan historiografi tradisional mengenai eksistensi komunitas lokal Kutai kuno jauh sebelum masa kisah permukiman Bugis di Samarinda Seberang. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas sejarah kedatangan rombongan La Mohang Daeng Mangkona di Samarinda Seberang yang diklaim sebagai dasar Hari Jadi Kota Samarinda. Dengan metode penelitian sejarah diperoleh hasil bahwa kisah La Mohang Daeng Mangkona sebagai pemimpin para perantau Bugis Wajo ke Samarinda tidak berdasarkan sumber sejarah yang valid. Direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Samarinda agar merevisi dan merekonstruksi ulang sejarah Hari Jadi Kota Samarinda dengan metode historiografi.

Kata kunci: Samarinda, Hari Jadi, Daeng Mangkona, Bugis Wajo, Kutai

PENDAHULUAN

Pada bulan Januari dalam beberapa tahun terakhir, polemik seputar perayaan hari jadi ibu kota Kalimantan Timur terus mengemuka. Polemik berkaitan dengan ritual tahunan perayaan ulang tahun kelahiran kota dan pemerintahan kota yang dirayakan pada tanggal yang sama. Padahal hari jadi kota dan hari lahir pemerintah daerah adalah dua hal yang berbeda. Meskipun klaim tahun pendirian kota dan tahun kelahiran pemerintah daerah berbeda, tetapi tanggalnya ditetapkan sama pada 21 Januari. Hari Jadi Kota Samarinda diklaim terjadi pada 21 Januari 1668, sedangkan hari lahir Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda adalah 21 Januari 1960.

Hari Ulang Tahun Pemkot Samarinda relatif tidak bermasalah karena mempunyai landasan historis yang jelas. Pada 21 Januari 1960 terjadi penyerahan kekuasaan dari Kepala Daerah Istimewa (DI) Swapraja Kutai Sultan Aji Muhammad Parikesit kepada tiga kepala daerah hasil pemekaran DI Kutai. Satu di antara kepala daerah itu adalah Wali Kotapraja Samarinda, Kapten Soedjono. Peristiwa serah terima jabatan kepala daerah tersebut ditetapkan sebagai tonggak terbentuknya Pemerintahan Daerah Kotapraja Samarinda (Imansjah, 1970: 50).

Kejelasan tanggal HUT Pemkot tidak dibarengi dengan penetapan Hari Jadi Kota Samarinda. Terdapat kontroversi dalam hikayat permukiman pendatang dari luar Kalimantan di Samarinda Seberang pada 1668 yang dijadikan landasan tonggak berdirinya Kota Samarinda. Ketokohan La Mohang Daeng Mangkona yang ditahbiskan sebagai pendiri Kota Samarinda menuai polemik. Sumber sejarah tokoh ini diragukan keabsahan dan validitasnya.

Penetapan sebuah kawasan sebagai kota tergantung perspektif yang dipergunakan. Dari sudut pandang ekonomi, suatu wilayah dapat disebut kota apabila menjadi pusat produksi, perdagangan, dan distribusi dengan basis organisasi-organisasi ekonomi. Menurut Max Weber dalam bukunya *The City* terbitan 1966, sebagaimana dinukil Basundoro, kota merupakan permukiman yang penduduknya lebih memprioritaskan perdagangan ketimbang agraris (Basundoro, 2012: 12). Sementara menurut sosiolog, kota ialah permukiman permanen dengan keragaman dan kepadatan penduduknya. Gordon Childe sebagaimana dikutip Basundoro mengkhususkan definisi kota dari peradaban penduduknya yang mempunyai pengetahuan dalam tulis-menulis (Basundoro, 2012: 15-17).

Berbeda dengan pakar tata kota atau arsitek yang menekankan definisi kota pada infrastruktur atau bangunan fisik, Mayer lebih melihat makna kota pada aspek manusianya. Menurutnya, kota merupakan sebuah sistem organisasi. Dari perspektif ini, kota ialah suatu karya peradaban yang lahir dari pedesaan. Basundoro menyitir pendapat P.J.M. Nas yang mendefinisikan kota sebagai suatu lingkungan buatan manusia, pusat produksi, komunitas sosial, komunitas budaya, dan komunitas terkontrol (Basundoro, 2012: 17-18).

Peringatan hari jadi sebuah kota diperlukan sebagai satu dari momentum sarana evaluasi pembangunan kota yang dilaksanakan oleh pemkot. Hari jadi kota juga dapat berfungsi sebagai bagian dari edukasi sejarah bagi pelajar dan masyarakat umum. Namun, penetapan hari jadi kota harus dilakukan dengan objektif dan berbasis metode ilmiah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan. *Pertama*, menganalisis validitas narasi sejarah kedatangan La Mohang Daeng Mangkona sebagai pemimpin rombongan dari Wajo ke Samarinda Seberang pada tanggal 21 Januari 1668. Kedua, mendeskripsikan tonggak penting dalam sejarah dinamika Kota Samarinda. Riset sejarah ini diharapkan bermanfaat meluruskan informasi sejarah lokal dan berfaedah sebagai solusi bagi perumusan kembali Hari Jadi Kota Samarinda.

METODE

Karya tulis tentang kontroversi Hari Jadi Kota Samarinda ini disusun dengan metode penelitian sejarah. Tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, hingga historiografi dilakukan dalam mengerjakan penelitian ini, sebagaimana standar ilmu sejarah.

Tahapan pertama, heuristik, yaitu pengumpulan sumber sejarah. Dilakukan penghimpunan sejumlah pustaka dan referensi baik terbitan pemerintah maupun selainnya, yang menarasikan berdirinya Kota Samarinda. Dihimpun pula naskah-naskah klasik abad ke-19, termasuk manuskrip *Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara* beraksara Arab Melayu yang bisa diakses secara digital di situs Perpustakaan Berlin.

Tahapan kedua, kritik sumber, yaitu melakukan verifikasi atau pengecekan atas sumber sejarah melalui kritik ekstern dan kritik intern. Sumber yang ditemukan diperiksa keaslian/keabsahan literturnya dan juga derajat kredibilitas informasinya. Buku resmi Pemerintah Kota Samarinda yang berjudul *Merajut Kembali Sejarah Kota Samarinda*, terbitan 2004, merupakan sumber utama yang dijadikan objek investigasi. Buku yang menjadi sumber polemik ini diungkap aspek kontroversi serta sanggahannya.

Tahapan ketiga, interpretasi, yaitu penafsiran atau pemberian makna atas fakta dan sumber sejarah. Pada tahap ini, peristiwa sejarah dianalisis bagaimana prosesnya dan bagaimana memahami proses terjadinya sejarah tersebut. Setelah mengungkap kontroversi masalah Hari Jadi Kota samarinda, diajukan alternatif solusi untuk revisi hari jadi tersebut.

Tahapan keempat, historiografi, yaitu penulisan sejarah dengan memuat tiga substansi yaitu pendahuluan, hasil penelitian, dan simpulan. Penulisannya dengan pembahasan yang memiliki retorik dan bahasa yang mudah dipahami publik secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 1 Tahun 1988 menetapkan Hari Jadi Kota Samarinda adalah pada tanggal 21 Januari 1668 Masehi, bertepatan dengan 5 Sya'ban 1078 Hijriah. Dasar Perda tersebut adalah hikayat kedatangan rombongan Bugis Wajo yang dipimpin La Mohang Daeng Mangkona di Samarinda Seberang. Penetapan tanggal 21 Januari 1668 ini berdasarkan asumsi penambahan durasi 64 hari sejak penandatanganan Perjanjian Bongaya di Sulawesi pada 18 November 1667. Pernyataan ini termuat dalam buku *Merajut Kembali Sejarah Kota Samarinda* (selanjutnya disingkat *MKSKS*) terbitan Humas Pemkot Samarinda (2004) halaman 168.

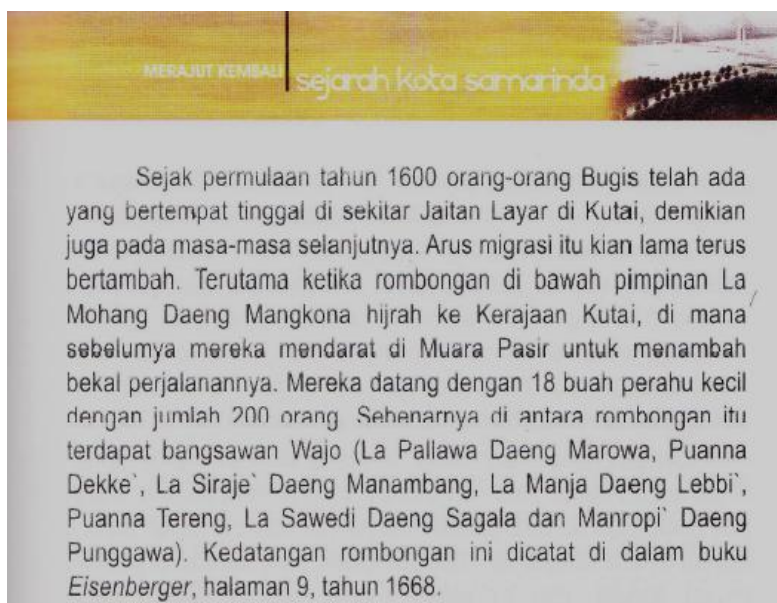
Presisi atau ketepatan asumsi tanggal 21 Januari sebagai Hari Jadi Kota Samarinda tampak disengaja karena Hari Lahir Pemerintah Kota juga jatuh pada tanggal 21 Januari (1960). Di Kalimantan Timur, hanya Samarinda yang merayakan hari jadi kota dan HUT pemda dalam satu tanggal yang sama. Padahal pada 21 Januari 1960, serah terima jabatan kepala daerah tidak hanya untuk Samarinda, tetapi juga untuk Wali Kotapraja Balikpapan dan Bupati Kabupaten Kutai. Namun, Pemkot Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten Kutai tidak merayakan HUT pemdanya pada 21 Januari. Mulai medio dekade 1990-an Pemerintah Kotamadya Samarinda membangun kompleks makam di Samarinda Seberang dengan pemasangan papan nama "Makam Lamohang Daeng Mangkona". Memasuki abad ke-21 dimulai ziarah rutin birokrat ke makam tersebut dalam momen HUT Pemkot. Nama La Mohang Daeng Mangkona pun dinobatkan sebagai pendiri Kota Samarinda.

Kontroversi Buku Sejarah Samarinda Versi Pemkot

Perumusan Perda No. 1 1988 tentang Hari Jadi Kota Samarinda dilakukan lebih dari tiga dekade lampau dengan keterbatasan akses sumber sejarah. Buku *MKSKS* versi Pemkot 2004 yang menarasikan La Mohang Daeng Mangkona perlu ditelaah secara kritis. Buku ini memuat Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Drs. H. Achmad Amins tentang Tim Penulis yang diketuai oleh Syarifuddin HR. Sebelas nama lainnya yaitu Wakil Ketua Dachlansjahrani, Sekretaris M. Ridwan Tasa, Wakil Sekretaris I Umar Vaturusi, Wakil Sekretaris II Masrullah, serta anggota Mochdar Hasan, Yusradiansyah, Oemar Dachlan, Mugni Baharuddin, M. Noor ARS, dan Sofiansyah AS.

Buku *MKSKS* pada halaman 5 menyatakan bahwa kisah kedatangan rombongan Daeng Mangkona tahun 1668 dicatat dalam buku Eisenberger halaman 9. Berdasarkan pemeriksaan daftar pustaka, Buku Eisenberger dikutip adalah berjudul *Kroniek der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo*. Buku ini terbitan tahun 1936. Ternyata pada halaman 9 tidak ada teks La Mohang Daeng Mangkona. Pemeriksaan pada bagian Indeks juga tidak menemukan La Mohang Daeng Mangkona. Hasil pemeriksaan final menunjukkan bahwa seluruh isi buku Eisenberger tidak ada satu pun teks yang memuat nama La Mohang Daeng Mangkona. Berdasarkan pemeriksaan

tersebut, penyusun buku *MKSKS* telah mencatat buku Eisenberger untuk membuat seolah-olah kisah Daeng Mangkona bersumber dari referensi ilmiah. Dengan demikian, penyusun buku *MKSKS* patut diduga telah melakukan fabrikasi data atau merekayasa data.



Gambar 1. Cuplikan buku *Merajut Kembali Sejarah Kota Samarinda* (2004) halaman 5 yang mencatat keterangan dari buku Eisenberger.
Sumber: pindaian buku *MKSKS*, 2004.

Berikutnya, buku *MKSKS* pada halaman 33 menyatakan bahwa Daeng Mangkona pergi ke Kutai berdasarkan perintah pemimpin Wajo, La Maddukelleng. Pada halaman 168 disebutkan bahwa keberangkatan terjadi pada tahun 1667. Padahal faktanya menurut sejarawan Merle Calvin Ricklefs, La Maddukelleng berkelahiran tahun 1700 (Ricklefs, 2016: 102). Oleh karena itu, hal yang mustahil apabila Daeng Mangkona mendapat perintah pada tahun 1667 dari orang yang baru lahir 33 tahun kemudian. Dengan demikian, kisah Daeng Mangkona ini anakronistik atau tidak cocok dengan zamannya. Kisahnya juga tergolong ahistoris.

Sebenarnya, dari daftar isi saja telah tampak sistematika buku *MKSKS* yang tidak sesuai dengan metode historiografi. Judul bab 2 dan bab 3 sama, yaitu Perkembangan Kampung Menjadi Kota. Sub pembahasan tentang zaman Belanda di Samarinda juga terulang dalam dua bab berbeda, yakni di bab 1 dan bab 3. Kekeliruan lainnya adalah sub bab masa awal Samarinda termuat di bab 3, padahal bab 1 dan bab 2 sudah membahas soal tersebut. Pada bagian teks isi, terdapat cara penulis menyebut dirinya dengan menggunakan kata ganti orang pertama, yakni "saya". Ini terjadi pada halaman 148. Padahal buku ini ditulis oleh tim beranggotakan dua belas orang.

Setelah pengungkapan sejumlah kekeliruan fatal dalam buku *MKSKS*, muncul pendapat yang membela buku ini dengan beberapa dalih. Pembelaan didasarkan pada alasan bahwa buku *MKSKS* ditulis oleh para pakar sejarah dan sesepuh Kota Samarinda seperti Dachlansjahrani, Oemar Dachlan, M. Noor A.R.S, dan Amir Hamzah Idar, sehingga dijamin kebenarannya. Dalih ini dapat disanggahan dengan mempertimbangkan bahwa pencantuman nama-nama tokoh tersebut sebagai anggota tim penulis buku *MKSKS* tidak otomatis menjadi landasan pembenaran terhadap isi buku. Perlu pula ditelusuri, sejauh mana keterlibatan riil para sepuh dalam penulisan buku *MKSKS*.

Contoh kesalahan fatal yang tertulis di awal bab 1 pada buku tersebut yang menyatakan bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara dikenal sebagai “kerajaan tertua di Indonesia”. Sekiranya pernyataan ini dinisbatkan atau disandarkan kepada seorang Oemar Dachlan, niscaya merupakan tindakan penistaan terhadap beliau. Oemar Dachlan sebagai wartawan tiga zaman dalam banyak media dan buku sangat memahami bahwa Kerajaan Kutai Kertanegara baru berdiri pada tahun 1300 (Dachlan, 2000: 85–86). Pendirinya adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti di Jaitan Layar (Kutai Lama). Adapun yang disebut tertua itu sebenarnya adalah Kerajaan Martapura Dinasti Mulawarman di Muara Kaman yang berdiri pada abad ke-4 (Sarip, 2020: 50–61).

Dengan satu contoh ini saja, bisa diragukan dan dipertanyakan realitas keterlibatan para sepuh dalam penyusunan buku *MKSKS*. Dengan kata lain, seandainya Oemar Dachlan dkk memeriksa naskah buku tersebut sebelum diterbitkan, mustahil muncul pernyataan fundamental yang ahistoris tersebut. Artinya, kemungkinan besar Oemar Dachlan tidak terlibat sepenuhnya dalam penulisan buku *MKSKS*.

Klaim Lontara Bugis

Sebuah buku yang ditulis oleh Fidy Finandar dkk yang berjudul *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Kalimantan Timur* memuat informasi adanya naskah saduran atau terjemahan Lontara Samarinda yang menyajikan teks Kota Samarinda dibangun oleh orang-orang Bugis di bawah pimpinan La Mohang Daeng Mangkona pada 1668 (Finandar et al., 1983: 1). Naskah saduran ini diklaim merupakan tulisan I Kirana Kapitan Ranreng Daeng Risompa. Penyadur Lontara ini adalah Moh Noor Ars, seorang yang pernah menjadi pejabat Bidang Kebudayaan Kaltim era 1960–1970-an. Pria kelahiran Berau tahun 1914 ini memberi judul koleksinya dengan “Catatan Sejarah Ringkas Kedatangan Orang Bugis di Samarinda” (Finandar et al., 1983: 113). Namun, naskah ini hanya klaim koleksi pribadi Ars yang tidak bisa diakses publik. Referensi ini bersifat tidak dipublikasikan dan hingga ia wafat naskahnya juga tidak diakuisisi oleh instansi pemerintah daerah. Peneliti belum menemukan Lontara asli maupun salinannya yang diklaim koleksi Ars. Dampaknya, tahapan verifikasi sumber subkritik ekstern terhadap Lontara ini tidak bisa dilakukan.

Sosok Moh Noor Ars sebagai pemilik kolektor Lontara dalam rekam jejaknya sebagai penulis mempunyai catatan khusus. Ia pernah membuat kontroversi dalam hal penciptaan riwayat sejarah. Ketika menjabat Kepala Inspeksi Daerah Kebudayaan Kaltim, Ars memimpin penerbitan majalah *Kudungga* yang terbit tahun 1967 sebanyak empat edisi. Dalam majalah inilah kali pertama dimuat daftar lengkap para raja yang memerintah di Kerajaan (Kutai) Martapura di Muara Kaman sejak abad ke-4 hingga abad ke-17. Seorang mahasiswa bernama Mohammad Asli Amin yang kala itu sedang menyusun skripsi bertema Kerajaan Kutai mengkonfirmasi kepada Ars perihal sumber primer susunan raja di Muara Kaman. Dalam hal ini, informasi para raja di Muara Kaman yang datanya valid hanya ada tiga raja yang bersumber dari Prasasti Yupa dan dua raja dari manuskrip *Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara*. Adapun puluhan nama raja lainnya hanya terdapat dalam majalah *Kudungga*. Ars menjawab konfirmasi Asli Amin, bahwa sumbernya adalah hasil ucapan pawang (dukun) dalam sebuah upacara belian atau ritual tradisional (Amin, 1975: 47). Tentu saja, teknik heuristik atau pengumpulan sumber sejarah berbasis imajinasi yang dilakukan Ars ini tidak dikenal dalam metode penelitian sejarah.

Selain kritik ekstern Lontara yang diragukan keabsahannya, kritik intern terhadap klaim Lontara juga bertolak belakang dengan sumber sejarah lain yang lebih valid yaitu naskah *Salasila Bugis di Kutai* yang transliterasinya bisa diakses terbuka oleh publik. Riwayat asal usul Bugis di tanah Kutai ini diteliti oleh ilmuwan Belanda, Solco Walle Tromp, pada tahun 1887. Hasil penelitiannya dituliskan dalam karya berjudul "*Eenige Mededeelingen Omtrent de Boeginezen van Koetai*". Tulisan berbahasa Belanda ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh antropolog Frieda Amran. Terjemahan plus saduran tersebut dipresentasikan dalam Seminar dan Dialog Internasional Kemelayuan Indonesia Timur di Universitas Hasanuddin, Makassar, 6 Oktober 2016 (*Tribunnews.com*, 6 Oktober 2016).

Bertolak belakang dengan versi Lontara, *Salasila Bugis di Kutai* secara jelas menyebutkan nama pimpinan Bugis yang meminta izin kepada Raja Kutai untuk bermukim di Samarinda adalah Anakhoda Latuji. Tidak ada nama La Mohang Daeng Mangkona dalam *Salasila Bugis di Kutai*.

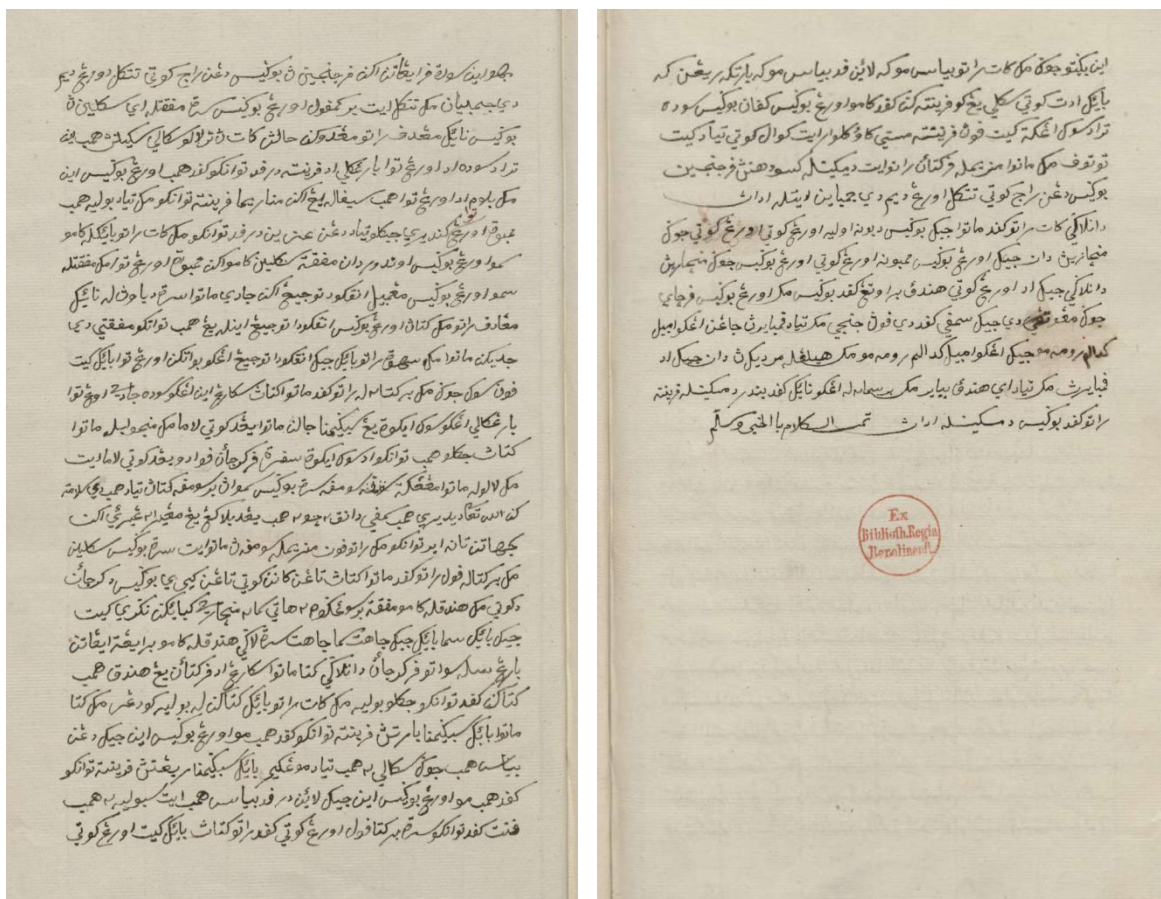
Telaah Surat Perjanjian Bugis dan Raja Kutai

Kerajaan Kutai Kertanegara mempunyai naskah historiografi tradisional yang bernama *Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara*. Manuskrip ini beraksara Arab Melayu dan disimpan di Perpustakaan Berlin, Jerman. Dalam kitab klasik yang ditulis Khatib Muhammad Thahir ini terdapat lampiran "Surat Peringatan akan Perjanjian Bugis dan Raja Kutai". Lampiran ini juga ditulis dengan aksara Arab Melayu. Isinya menceritakan awal mula orang Bugis meminta izin kepada Raja Kutai untuk bermukim di Samarinda dan perintah Raja Kutai kepada orang Bugis untuk hidup tertib dalam satu komunitas suku yang dikepalai seorang *pua adu*.

Nama Latuji yang tercantum dalam *Salasila Bugis di Kutai* juga sesuai dengan nama pemimpin Bugis dalam surat perjanjian antara Bugis dengan Raja Kutai. Surat perjanjian ini diteliti oleh ahli sejarah Constantinus Alting Mees untuk keperluan disertasinya tahun 1935. Transliterasi surat tersebut dimuat dalam bukunya yang legendaris yang berjudul *De Kroniek van Koetai Tekstuitgave Met Toelichting* (Mees, 1935: 264–265).

Surat perjanjian Bugis dan Raja Kutai tidak mencantumkan waktu penulisannya, sebagaimana yang diklaim dalam buku *MKSKS* yang menyebutkan bahwa kejadiannya tahun 1668. Ibu kota Kerajaan Kutai yang menjadi tempat orang Bugis menghadap raja kala itu berlokasi di Jembayan. Ini berarti pertemuan terjadi minimal pada tahun 1732 sesuai dengan catatan sejarah bahwa pusat kerajaan dari Kutai Lama dipindahkan ke Jembayan pada tahun 1732–1782. Dengan demikian, penetapan tahun 1668 sebagai masa awal permukiman Bugis di Samarinda tidaklah tepat.

Masalah krusial berikutnya terletak pada nama pemimpin orang Bugis yang disetujui sebagai *pua adu* atau kepala suku Bugis pertama di Samarinda adalah Anakoda Tujing. Tidak ada nama La Mohang Daeng Mangkona dalam surat perjanjian ini. Begitu pula dalam manuskrip *Salasilah Bugis di Kutai* yang diteliti oleh Solco Walle Tromp tahun 1887. Tromp adalah Asisten Residen *Afdeeling* Kutai dan Pesisir Timur Laut Kalimantan yang berkedudukan di Samarinda periode 1884–1886. Naskah *Salasilah Bugis di Kutai* menyebut nama *pua adu* pertama adalah Anakoda Latuji (Tromp, 1887: 176–179). Seluruh isi naskah *Salasilah Bugis di Kutai* tidak memuat satu pun kata Mangkona, alih-alih nama lengkap La Mohang Daeng Mangkona.



Gambar 2 & 3. Dua halaman tess Arab Melayu surat peringatan akan perjanjian Bugis dengan Raja Kutai.
 Sumber: *Manuskrip Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara, 1849.*

Klaim Makam Tua di Samarinda Seberang

Pendukung teori La Mohang Daeng Mangkona sebagai pendiri Kota Samarinda menunjukkan keberadaan makam La Mohang Daeng Mangkona di Samarinda Seberang sebagai buktinya. Namun, dalih ini bisa disanggah. Seandainya makam tersebut valid sebagai tempat bersemayamnya jenazah tokoh yang bernama La Mohang Daeng Mangkona, maka keberadaannya hanya sebagai indikasi realitas tokoh tersebut, tetapi tidak otomatis menjustifikasi bahwa rombongan Daeng Mangkona merupakan penghuni pertama Samarinda dan yang mendirikan kota ini. Analoginya, keberadaan makam tua di Muara Kaman di Muara Kaman yang puseranya beraksara Arab, tidak melazimkan bahwa mereka merupakan pendiri Muara Kaman. Tidak bisa juga ditetapkan bahwa mereka adalah penghuni awal Muara Kaman. Walaupun makam lain yang lebih tua tidak ditemukan, tetapi terdapat sumber tertulis berupa prasasti yupa yang menginformasikan bahwa generasi awal Muara Kaman telah eksis pada zaman Hindu-Budha kisaran abad ke-4 Masehi. Jadi, ketiadaan atau belum ditemukannya jejak makam lain yang lebih tua di Samarinda tidaklah menihilkan sejarah peradaban yang lebih tua sebelum abad ke-17.

Hingga pertengahan dasawarsa 1980-an masyarakat Samarinda hanya mengenal dua makam tua. Keduanya terletak berseberangan, terpisah oleh Sungai Mahakam. Makam pertama berada di Mangkupal, sebuah kawasan tua yang sudah ber peradaban sejak abad ke-13 Masehi. Namun, bukan makam La Mohang Daeng Mangkona. Pada batu nisannya tertulis aksara Arab: "Pangeran Raja Surya". Makam kedua terletak di Sungai Kerbau, sebuah kampung di pesisir Sungai Mahakam bagian timur-tenggara. Masyarakat mengenal makam ini sebagai kuburan keramat berdasarkan folklor tentang ahli ukir dari Jawa/Majapahit. Moh. Nur Ars yang menulis hikayat Daeng Mangkona justru tidak menemukan makamnya. Hanya ada dua makam di Samarinda yang dikategorikan sebagai peninggalan purbakala (Ars, 1986: 53-54).

Sementara itu, makam La Mohang Daeng Mangkona sebenarnya baru pada medio 1990-an disosialisasikan pemerintah sebagai makam tokoh pendiri Samarinda. Keberadaan makam ini baru mencuat setelah adanya klaim penemuan oleh M. Thaha pada era 1990-an. Hal ini diwartakan sendiri oleh Pemkot ketika menerbitkan buku profil 46 tokoh masyarakat penerima penghargaan dalam rangka HUT Pemkot Samarinda ke-47 tahun 2007. Dalam buku berjudul *Pengabdian Menuai Penghargaan Mutiara-Mutiara Samarinda Edisi Ketiga*, diceritakan bahwa Wali Kota H. Achmad Amin memberikan penghargaan kepada M. Thaha (kelahiran 1944) karena jasanya sebagai penemu dan penjaga makam Daeng Mangkona (Vaturusi & Hasan, 2007: 39).

Terungkapnya fakta bahwa makam Daeng Mangkona baru ditemukan pada tahun 1990-an menimbulkan interpretasi bahwa keberadaan makam tersebut sebelumnya tidak terdeteksi. Dengan kata lain, tidak ada perawatan secara kontinu atau turun-temurun terhadap makam tokoh Samarinda hingga penghujung abad ke-20. Tafsiran lain, eksistensi Daeng Mangkona memang tidak lekat padanya sebagai pendiri Kota Samarinda.

Tonggak Penting Dinamika Kota Samarinda

Sejarah peradaban Samarinda tidak dimulai pada tanggal 21 Januari 1668 sebagaimana tanggal yang ditetapkan Perda Kotamadya Samarinda No. 1 Tahun 1988. Awal kehidupan Samarinda tidak dimulai dari prediksi tanggal kedatangan rombongan Bugis Wajo pertama kali di Samarinda. Wilayah Samarinda sebelum ditetapkan sebagai kota dan sebelum didatangi para perantau dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa, sudah memiliki sejarah.

Dalam manuskrip *Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara* tertulis enam nama negeri tradisional di Samarinda yang kehidupannya sezaman dengan masa kecilnya Aji Batara Agung Dewa Sakti, dengan linimasa berarti kisaran abad ke-13 Masehi. Enam negeri itu adalah Pulau Atas, Karangasan, Karamumus, Luah Bakung, Sembuyutan, dan Mangkupelas. Kini keenam permukiman kuno telah menjadi nama wilayah administratif Kelurahan Pulau Atas, Karang Asam, Karang Mumus, Loa Bakung, Sambutan, dan Mangkupal (Thahir, 1849: 16).

Dari enam negeri tersebut, mayoritas berada di sisi utara Sungai Mahakam atau di kawasan Samarinda kota sekarang. Hanya satu negeri yang terletak di sisi selatan Sungai Mahakam atau di kawasan Samarinda Seberang sekarang, yakni Mangkupalas. Namun, semuanya sama-sama menempati pesisir sungai. Hal ini dilandasi fungsi sungai sebagai sarana perhubungan dan sumber air tawar serta penyedia bahan pangan masyarakat.

Dalam historiografi tradisional Kutai diwartakan bahwa ketika calon raja pertama Kutai Kertanegara, Aji Batara Agung Dewa Sakti, masih kanak-kanak, dilakukan upacara tajak tanah untuk Putri Karang Melanu di Negeri Jaitan Layar. Lokasi ini sekarang di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebuah kawasan di hilir Sungai Mahakam dari arah tenggara Samarinda. Pada ritual tersebut penduduk dari enam negeri Samarinda turut datang ke Jaitan Layar. Tidak disebutkan secara rinci suku apa yang mendiami enam negeri tersebut (Sarip, 2017: 23). Namun, berdasarkan linimasa kejadiannya, dapat dipastikan bahwa penduduk tersebut bukan dari suku Bugis karena rombongan Bugis Wajo baru merantau ke daerah Samarinda Seberang pada awal abad ke-18. Sebelum kedatangan rombongan dari Pulau Sulawesi, Samarinda bukanlah *terra incognita* atau kawasan kosong yang tidak berpenghuni. Dalih berdirinya Kota Samarinda karena kedatangan manusia dari pulau seberang, otomatis gugur karena telah eksis permukiman penduduk di tanah Samarinda jauh sebelum kehadiran pendatang.

Kerajaan Kutai Kertanegara mempunyai relasi sebagai monarki vasal dari Kerajaan Banjar sejak zaman Maharaja Suryanata hingga era Kesultanan Banjar (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 85; Ras, 1990: 323). Hal ini berpengaruh pada tumbuhnya kultur dan peradaban Banjar di Samarinda. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan telah mengakui dialek Banjar Samarinda sebagai satu di antara bahasa Melayu yang dipergunakan dalam masyarakat Kalimantan Timur (*Petabahasa.Kemdikbud.go.id*, 2019).

Beberapa komunitas pendatang dari luar Kalimantan, yakni Sulawesi, Jawa, Tiongkok, yang turut bermukim di Samarinda untuk motif ekonomi, juga terpengaruh dengan kultur Banjar terutama penggunaan bahasa Banjar sebagai bahasa pergaulan (*lingua franca*). Dalam konteks ini, bahasa merupakan sebuah unsur kebudayaan universal yang menunjukkan identitas sebuah komunitas atau bangsa. Banjar sebagai pembentuk bahasa daerah Samarinda mengindikasikan hegemoni orang Banjar yang lebih lama daripada etnis lain dalam hal bermukim di Samarinda. Bahkan, tokoh wartawan tiga zaman Kaltim yang banyak menulis sejarah, yakni Oemar Dachlan, menyebut "penduduk asli" bagi orang Banjar di Samarinda. Pernyataan tokoh kelahiran Samarinda 1913 ini dimuat dalam sebuah surat kabar di Jakarta, *Berita Buana*, terbitan 25 Juni 1987 (Dachlan, 2000: 206).

Mengenai topinimi Samarinda, Dachlan mengungkapkan asal usulnya dari kata *sama-rendah*. Namun, dasarnya bukan perumahan rakit yang sama rendah di tepi Sungai Mahakam. Alasannya juga bukan status penduduk rendahan di Samarinda Seberang, sebagaimana disebut dalam buku *Provinsi Kalimantan Republik Indonesia*, terbitan 1953. Sama-rendah yang dimaksud, menurut Dachlan, ialah kondisi permukaan daratan di Samarinda yang sama rendahnya—atau mirip ukuran tingginya—dengan permukaan Sungai Mahakam. Dalam majalah bulanan *Prima* terbitan April 1978, Dachlan menjelaskan, sampai awal dasawarsa tahun 1950-an setiap air Sungai Mahakam pasang naik, sebagian besar jalan-jalan di Samarinda selalu terendam air. Istilah sama-rendah merujuk permukaan tanah yang tidak bergerak dan tetap rendah, bukan ukuran permukaan sungai yang airnya naik-turun. Karena itu, menurut Dachlan, istilah yang dipergunakan bukan *sama-tinggi*, melainkan *sama-rendah*. Dachlan memberikan penekanan kata *rendah* dari bahasa Banjar. Lama-kelamaan nama tersebut berkembang menjadi diksi yang agak melodius kedengarannya, Samarinda (Dachlan, 2000: 133).

Buku riset Burhan Djabier Magenda berjudul *East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy* yang terbit di New York mempertegas peranan orang Banjar dalam mendirikan Kota Samarinda. Magenda menulis, “The Banjarese also settled along the Mahakam River, establishing small towns, bringing with them their skills in trade and organization. Indeed it was the Banjarese who established the small towns along the Mahakam River, from Samarinda to Long Iram.” Menurut akademisi FISIP Universitas Indonesia tersebut, orang Banjar menetap di sepanjang Sungai Mahakam, mendirikan kota-kota kecil, membawa serta keterampilan mereka dalam perdagangan dan organisasi. Memang, lanjut Magenda, orang Banjar-lah yang mendirikan kota-kota kecil di sepanjang Sungai Mahakam, dari Samarinda sampai Long Iram (Magenda, 1991: 3).

Analisis Magenda turut dinukil oleh Yekti Maunati, ahli sosiologi dan antropologi di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dalam bukunya yang meneliti sebuah sub-Dayak di Samarinda. Bukunya terbit kali pertama dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh LKiS dengan judul *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Maunati mendeskripsikan peran strategis orang Banjar membantu perpolitikan Kesultanan Kutai, yang dimulai dengan pembangunan permukiman bernama Samarinda (Maunati, 2004: 313).

Kesultanan Kutai menjadikan Samarinda sebagai kota bandar atau pelabuhan sejak tahun 1732 atau bersamaan dengan pemindahan ibu kota Kerajaan Kutai dari Kutai Lama ke Pamarangan-Jembayan. Selanjutnya, kedatangan Kolonialis Belanda di wilayah Kesultanan Kutai pada 1844 disertai penaklukan, mengukuhkan Samarinda sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda di Oost Borneo (timur Kalimantan) dengan penempatan jabatan Asisten Residen

(Ahyat, 2013: 34; Dewan Redaksi Penerbitan Kutai Masa Lampau, Kini, dan Esok, 1979: 16; Wirakusumah, 1978: 58). Gubernur Hindia Belanda menerbitkan Surat Keputusan No. 75 tanggal 16 Agustus 1896 yang menetapkan status Kota Samarinda sebagai *Vierkante-Paal*, wilayah satu pal persegi pusat birokrasi politik dan ekonomi (Tim Penyusun, 1992: 221-222).

Pada masa Pergerakan Nasional 1908-1942, Samarinda menjadi pusat pendidikan rakyat dan gerakan kebangsaan di Kalimantan Timur. Samarinda terus berfungsi sebagai pusat perjuangan dan revolusi di Kaltim mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 (Wirakusumah, 1978: 58, 59, 73). Pada 1953-1957 Samarinda dijadikan ibu kota Daerah Istimewa Kutai. Sejak 1957 Samarinda resmi sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Pada 21 Januari 1960 Samarinda dibentuk sebagai kotapraja yang dimekarkan dari Daerah Istimewa Kutai. Kemudian dengan pemberlakuan UU No. 18 Tahun 1965 Samarinda berubah menjadi kotamadya (Tim Penyusun, 1970: 53). Berikutnya, sejak 1999 meningkat menjadi kota. Samarinda terus berkembang sebagai pusat birokrasi, ekonomi, edukasi, dengan penduduk yang beragam etnis dan religi, tetapi tetap mengapresiasi kultur lokal Kalimantan yang bernuansa Banjar, Kutai, dan Dayak.

Alternatif Rekonstruksi Hari Jadi Kota Samarinda

Pemkot Samarinda perlu merevisi dan merumuskan ulang teks sejarah berdirinya Kota Samarinda secara objektif dengan pelibatan tenaga bidang sejarah yang berkompeten. Adapun tanggal 21 Januari tetap bisa dijadikan momen seremoni bagi Pemerintah Kota Samarinda, akan tetapi cukup dan sebatas HUT Pemkot Samarinda. Hal ini karena penetapan tanggal memang tepat sesuai sejarah terbentuknya Pemerintahan Daerah Kotapraja Samarinda pada 21 Januari 1960.

Terdapat sejumlah opsi yang bisa diajukan untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Samarinda. *Pertama*, apabila Hari Jadi Kota Samarinda dihitung dari riwayat eksistensi manusianya, maka tonggakannya adalah kisaran abad ke-13 Masehi, sezaman dengan situasi menjelang berdirinya Kerajaan Kutai Kertanegara pada tahun 1300. Pendapat ini didasarkan pada eksistensi kehidupan masyarakat kuno di enam negeri tradisional di wilayah yang belum bernama Samarinda. Perkiraan tahunnya adalah sekitar tahun 1200-an, atau 1250-an. Namun, penanggalannya agak sulit karena keterbatasan sumber sejarah yang autentik.

Kedua, apabila Hari Jadi Kota Samarinda dihitung dari statusnya sebagai bandar atau pelabuhan dari Kesultanan Kutai, maka tonggak awalnya adalah sekitar tahun 1732. Momen ini adalah peristiwa pemindahan ibu kota Kerajaan Kutai Kertanegara dari Tepian Batu (Kutai Lama) ke Pamarangan-Jembayan (Dewan Redaksi Penerbitan Kutai Masa Lampau, Kini, dan Esok, 1979: 16).

Ketiga, jika Hari Jadi Kota Samarinda dihitung dari keberadaan struktur birokrasi modern, maka tonggakannya adalah tanggal 11 Oktober 1844. Momen ini ketika

ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Kutai Aji Mohammad Salehuddin dan pemerintah kolonial Belanda. Sejak itu Belanda menempatkan Asisten Residen di Samarinda sebagai pejabat yang mengepalai otoritas Hindia Belanda di wilayah Oost Borneo. Ini juga penanda dimulainya status Samarinda sebagai pusat birokrasi di timur Kalimantan (Wirakusumah, 1978: 58).

Keempat, jika Hari Jadi Kota Samarinda dihitung dari awal perencanaan fisik dan infrastruktur kota modern, maka tonggaknyanya adalah tanggal 16 Agustus 1896. Tanggal ini merupakan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No. 75 yang menetapkan Samarinda sebagai *Vierkante Paal* alias wilayah satu pal persegi (Tim Penyusun, 1992: 221-222). Struktur kota modern dengan perencanaan tata ruang yang memadai dimulai dari berlakunya status *Vierkante Paal* Samarinda.

Jika merujuk pada teori pembentukan negara bangsa (*nation state*) atau politik identitas, keberadaan sekelompok orang di wilayah tertentu yang mengidentifikasi dan mengikat diri/kelompoknya pada identitas tertentu sudah cukup untuk mengklaim eksistensi kelompoknya dan pada saat yang sama juga berarti mengklaim eksistensi wilayah yang mereka tempati. Dengan dasar ini, terbentuknya komunitas Samarinda yang bercirikan kultur khas Melayu-Banjar—indikatornya antara lain unsur kebudayaan bahasa Banjar Samarinda—merupakan satu dari tonggak penting dalam sejarah dinamika Samarinda. Persamaan rumpun Melayu antara Kutai dan Banjar menjadi determinan dalam pembentukan kultur Banjar Samarinda sebagai identitas kolektif masyarakat Samarinda, meskipun kemudian entitas penduduk Samarinda heterogen lintas etnis.

Poin penting dan utama dari tinjauan kritis Hari Jadi Kota Samarinda ini adalah tidak perlu mencari satu nama tokoh untuk diusung sebagai tokoh pendiri kota. Lebih urgen lagi, merupakan kekeliruan fatal apabila ada nama tokoh dari luar Kalimantan yang dikultuskan sebagai pendiri Kota Samarinda. Samarinda didirikan secara kolektif oleh penduduk Kutai dan Banjar atas restu Raja Kutai Kertanegara, sebelum adanya permukiman pendatang dari pulau seberang. Kultur Samarinda adalah terbuka terhadap pendatang dari manapun asalnya: Jawa, Sulawesi, Sumatra, Timur Tengah, Tiongkok, dan lain-lain termasuk Belanda yang pernah menjajah, selama mereka bersikap baik dan beradab. Tabel berikut ini merangkum perkembangan dinamika Kota Samarinda secara kronologis, yang memperlihatkan data bahwa kehidupan di kota ini tonggaknyanya tidak bermula dari sebuah permukiman pendatang pada penghujung abad XVII.

Tabel 1. Kronologi Perkembangan Kota Samarinda

Tahun	Peristiwa
±1250	Kehidupan enam komunitas kuno di enam negeri tradisional: Pulau Atas, Sembuyutan, Karamumus, Karangasan, Luah Bakung, Mangkupelas
1300	Enam perkampungan kuno di Samarinda menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Kertanegara
±1400	Kutai mengirimkan upeti kepada Nagara Dipa (Banjar Hindu) era Maharaja Suryanata
1525	Utusan Pangeran Samudra dari Banjarmasin datang ke Kutai meminta sokongan prajurit dan amunisi untuk koalisi pasukan Banjar menghadapi Pangeran Tumenggung
1732	Samarinda menjadi kota bandar dan pelabuhan Kesultanan Kutai
1735	Samarinda menjadi kota bandar dan pelabuhan Kesultanan Kutai
1844	Samarinda menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda di Oost Borneo
1896	Samarinda ditetapkan sebagai Vierkante Paal (wilayah satu pal persegi)
1946	Samarinda menjadi ibu kota Keresidenan Kalimantan Timur
1953	Samarinda menjadi ibu kota Daerah Istimewa Kutai
1957	Samarinda menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur
1960	Samarinda menjadi kotapraja
1965	Samarinda menjadi kotamadya
1999	Samarinda menjadi kota

Sumber: data diolah Muhammad Sarip & Nabila Nandini dari berbagai referensi

KESIMPULAN

Penulisan sejarah itu memang dinamis. Revisi teks sejarah merupakan keniscayaan setelah ditemukannya sumber-sumber baru dan analisis historis yang lebih tepat ketimbang teks lama. Dengan verifikasi yang ketat meliputi kritik ekstern dan intern, diperoleh hasil penelitian bahwa narasi resmi Hari Jadi Kota Samarinda yang berlandaskan kedatangan rombongan Bugis Wajo di Samarinda Seberang pada 21 Januari 1668, ternyata tidak valid.

Sejumlah kronologi perkembangan Samarinda sejak masa permukiman kuno hingga menjadi kota modern menunjukkan bahwa kedatangan orang-orang dari pulau seberang bukanlah titik awal kehidupan Samarinda. Yang sebenarnya, peradaban di Samarinda didirikan secara kolektif oleh penduduk Kutai dan Banjar sejak relasi antara Kerajaan Kutai Kertanegara dan Kerajaan Banjar.

Penelitian ini merekomendasikan Pemkot Samarinda untuk merekonstruksi sejarah Kota Samarinda, khususnya pada fragmen Hari Jadi Kota Samarinda. Akomodasi dan apresiasi terhadap semua entitas yang membangun Samarinda perlu dilakukan dengan tidak menetapkan nama satu orang sebagai tokoh pendiri Kota Samarinda. Keterbatasan penelitian ini dari aspek belum seluruhnya sumber terhimpun, diharapkan dapat dilanjutkan pada penelitian berikutnya.

REFERENSI

- Abdullah, Taufik & A.B. Lopian (Ed.) (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 3: Kedatangan dan Peradaban Islam*. Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve.
- Ahyat, Ita Syamtasyah. (2013). *Kesultanan Kutai 1825–1910: Perubahan Politik dan Ekonomi Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda*. Tangerang Selatan: Serat Alam Media, 2013.
- Ahyat, Ita Syamtasyah. (2015). "Perdagangan di Pelabuhan Samarinda pada Abad Ke-19". Makalah Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Amin, M. Asli, dkk. (1975). *Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai*. Tenggarong: Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.
- Amran, Frieda. (2016). "Salasila Bugis di Kutai". Makalah dalam Seminar dan Dialog Internasional Kemelayuan Indonesia Timur (Selogika IV) di Universitas Hasanuddin, Makassar, 6 Oktober 2016.
- Ars, Moh. Nur dkk. (1986). *Sejarah Kota Samarinda*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. (2019). "Bahasa Melayu Provinsi Kalimantan Timur".
[https://petabahasa.kemdikbud.go.id/infobahasa2.php?idb=123&idp=Kalimantan %20Timur](https://petabahasa.kemdikbud.go.id/infobahasa2.php?idb=123&idp=Kalimantan%20Timur). Diakses 20 November 2021.
- Basundoro, Purnawan. (2012). *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dachlan, Oemar. (2000). *Kalimantan Timur dengan Aneka Ragam Permasalahan dan Berbagai Peristiwa Bersejarah yang Mewarnainya*. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu.
- Dewan Redaksi Penerbitan Kutai Masa Lampau, Kini, dan Esok. (1979). *Kutai Perbendaharaan Kebudayaan Kalimantan Timur*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasrul. (2016). "Salasila Boegis, Naskah Penyebaran Orang Bugis di Kutai".
<https://makassar.tribunnews.com/2016/10/06/salasila-boegis-naskah-penyebaran-orang-bugis-di-kutai>. Diakses 20 November 2018.
- Kern, W. (1956). *Commentaar op de Salasilah van Koetai*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Knappert, S.C. (1905). "Beschrijving Van De Onderafdeeling Koetei." *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde*, Volume 58, Issue 1. 575–654.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Magenda, Burhan Djaber. (1991). *East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy*. New York: Cornell Modern Indonesia Project.
- Maunati, Yekti. (2004). *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mees, Constantinus Alting. (1935). *De Kroniek van Koetai Tekstuitgave Met Toelichting*. Santpoort: N.V. Uitgeverij.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto (Ed.). (2008). *Sejarah Nasional Indonesia IV Kemunculan Penjajahan di Indonesia (±1700–1900)*, Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ras, Johannes Jacobus. (1990). *Hikayat Banjar*. Diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ricklefs, M.C. (2016). *Sejarah Indonesia Modern*, cetakan ke-11 (dicetak pertama kali tahun 1991). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Sarip, Muhammad. (2017). *Samarinda Tempo Doeloe: Sejarah Lokal 1200–1999*. Samarinda: RV Pustaka Horizon.
- Sarip, Muhammad. (2018). *Dari Jaitan Layar sampai Tepian Pandan Sejarah Tujuh Abad Kerajaan Kutai Kertanegara*. Samarinda: RV Pustaka Horizon.
- Sarip, Muhammad. (2020). "Kajian Etimologis Kerajaan (Kutai) Martapura di Muara Kaman, Kalimantan Timur". *Yupa: Historical Studies Journal*, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.30872/yupa.v4i2.264>.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru Keempat, cetakan ke-34, 2002. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Thahir, Khatib Muhammad. (1849). *Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara*. (Aksara Arab Melayu). <http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00019D9A00000000>. Diakses 30 Juli 2019.
- Imansjah, dkk. (1970). *Buku Petunjuk Kotamadya Samarinda*. Samarinda: Pemerintah Kotamadya Samarinda.
- Tim Penyusun. (1986). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Tim Penyusun. (1992). *Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa*. Samarinda: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
- Tromp, S.W. (1887). "Eenige Mededeelingen Omtrent de Boeginezen van Koetai". *Bijdragen toot de Taal, Land en Volkenkunde*, vol. 36, issue 1.
- Vaturusi, Umar dan Hasan, Herman A. (2007). *Pengabdiannya Menuai Penghargaan Mutiara-Mutiara Samarinda Edisi Ketiga*. Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda.
- Wirakusumah, Sambas dkk. (1978). *Sejarah Daerah Kalimantan Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1976/1977.